



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD dr. ADHYATMA, MPH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFACHMI WAHAB
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 920890

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.236.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 353.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 253.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **361.000.000**

1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, YAMAHA X MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.500.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **307.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.914.500.000**

III. HUTANG **Rp.** **118.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.796.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO SUDEWI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 215124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 837 m2/750 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, WRV RS CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 407.193.241

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.540.693.241

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.540.693.241

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARSINI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 209489

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.101.500.000**

1. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 2550 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/130 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
4. Tanah Seluas 1592 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 4240 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
8. Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
9. Tanah Seluas 2008 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 179.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 695 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000
11. Tanah Seluas 1104 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL



SENDIRI Rp. 165.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/300 m2 di KAB / KOTA

KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/110 m2 di KAB / KOTA

SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

14. Tanah Seluas 4368 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL

SENDIRI Rp. 500.000.000

15. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

16. Tanah Seluas 1878 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL

SENDIRI Rp. 310.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/140 m2 di KAB / KOTA

SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

18. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI

Rp. 250.000.000

19. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL

SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 635.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER FORTUNER 2,4 VRZ 4X2 A/T

Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 200.236.311

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.972.736.311

III. HUTANG

Rp. 1.473.850.154

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.498.886.157

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.